

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Juniartha, 2020). Berlakunya otonomi daerah berarti pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih yaitu pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (Pujanira, 2017).

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah jika informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Sako, 2018). Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa

agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. Pengelolaan keuangan tersebut akan terlihat pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (Rahmawati, 2018).

Syarat terpenuhinya laporan keuangan sudah berkualitas salah satunya dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Menurut BPK RI, opini WTP adalah laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam hal ini berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 8 kali berturut-turut. Opini WTP tidak menjamin tidak ada kesalahan ataupun korupsi, ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai peraturan yang ada sehingga berdampak pada pembangunan di masyarakat (Fahmi, 2017:177).

Fakta pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang terjadi merupakan suatu hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jika dilihat di dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak data-data yang disajikan tidak sesuai dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti halnya di Pemerintahan Kabupaten Gianyar, yakni masih rendahnya kualitas informasi laporan keuangan daerah yang disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem akuntansi keuangan dan masih lemahnya sistem pengendalian

internal. Masih terdapat penatausahaan aset yang belum tertib dan masih terdapat pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai (Juniartha, 2020). Tahun 2017 BPK mengungkapkan terdapat temuan ketidakpatuhan di Kabupaten Gianyar terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat kelebihan pembayaran pajak gaji dan tunjangan PNS dan terdapat pengelolaan belanja yang tidak sesuai ketentuan, antara lain pengelolaan dan pertanggungjawaban. Permasalahan yang ditemukan dari sistem pengendalian internal adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar belum membuat peraturan teknis terkait pengelolaan dan manajemen kas serta proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak tepat waktu. Masalah lain yang menyangkut ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yaitu sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) tahun anggaran 2017 terlambat disetor ke kas, terjadinya kelebihan pembayaran pada beberapa pos seperti biaya transportasi, akomodasi, honorarium instruktur/narasumber, honorarium panitia pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial belum sepenuhnya sesuai ketentuan (<http://gianyarkab.go.id>).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Ikyarti, 2019). SAP diterapkan dilingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun

daerah, sehingga penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah (Rahmawati, 2018).

Salah satu hal yang juga mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Budiono (2018), walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, *cost* pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, suatu instansi juga membutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang kuat. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Tawaqal, 2017).

Selain itu keterampilan (*skill*) karyawan atau pegawai juga dapat diukur dengan lama masa kerja atau pengalaman kerjanya. Pengalaman akan menentukan dalam melaksanakan suatu tugas tertentu. Pengalaman kerja adalah ukuran lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang

sehingga dapat memahami tugas-tugas dalam suatu pekerjaan. Pengalaman kerja seorang pegawai dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting (Atika, 2019).

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan adanya pemahaman akuntansi bagi pihak yang penyusun laporan keuangan. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila mengerti bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan. Tingkat pemahaman yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas (Lestari, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018), Pujanira (2017) dan Sako (2018) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Mildamayanti (2018) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan OPD. Rahmawati (2018), Dewi (2021) dan Mutiana (2017) yang meneliti tentang pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan OPD mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Wardani (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian Mildamayanti (2018) selanjutnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Atika (2019) menyimpulkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan Budiono (2018) yang menemukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020) menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan Nilamsari (2020) yang menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka penting dilakukan penelitian tentang kualitas laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti kembali menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, tingkat pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar?
- 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar?
- 3) Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar?
- 4) Apakah tingkat pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar?
- 5) Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai aspek dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

##### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi mahasiswa tentang kualitas laporan keuangan sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara fakta di lapangan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi serta pembendaharaan perpustakaan bagi universitas, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan di dalam penelitian-penelitian lebih lanjut bagi yang membutuhkan.

##### **2) Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan tentang standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, tingkat pengalaman kerja dan pemahaman

akuntansi sebagai langkah perbaikan bagi pemerintahan di masing-masing daerah dalam kualitas laporan keuangan yang dihasilkan terutama di Daerah Kabupaten Gianyar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Kegunaan-Keputusan (*Decision-Usefulness Theory*)

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi merupakan bagian dari teori normatif. Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) adalah Chambers (1989). Pendekatan model keputusan ditujukan untuk mengetahui informasi apa yang diperlukan untuk membuat keputusan. Teori kegunaan-keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna informasi akuntansi. Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Premis dari teori kegunaan-keputusan meliputi tujuan akuntansi untuk menyediakan informasi laporan keuangan mengenai organisasi guna pengambilan keputusan (Chariri dan Ghozali, 2014:238).

Tujuan akuntansi dikaitkan dengan *stakeholder* yaitu menyediakan informasi keuangan mengenai suatu organisasi yang akan digunakan dalam pembuatan keputusan. Sikap manajemen terhadap penerapan standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi

tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi (Lestari, 2020).

### 2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah tingkat baik buruknya suatu laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan, Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Mildamayanti, 2018). Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

#### 1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang relevan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

## 2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
- c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3) Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

## 4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami apabila disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan mengenai kegiatan operasi entitas pelaporan.

### 2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman untuk pembuat laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsisten pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar (Nilamsari, 2020).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan ini memerlukan pemahaman yang baik dari setiap aparatur yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah beserta instansi-instansinya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, akan tetapi dalam penerapan tersebut perlu dipahami beberapa dasar pemikiran penting yang diharapkan dapat membantu penerapan standar akuntansi pemerintahan. Pemikiran tersebut adalah mengenai basis akuntansi yang dianut, hubungan antara sistem serta standar yang berlaku, dan selanjutnya diikuti proses penyusunan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan yang dihubungkan dengan kondisi masing-masing entitas (Rahmawati, 2018).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar

akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan (Merialsa, 2017:138).

#### **2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi adalah suatu studi, perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer (Rismawan, 2020). Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransaksikan, dan memperoleh informasi secara aman. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan *hardware*, *software*, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi. Dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi pemerintah daerah wajib untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Selain itu, dengan adanya pembuatan situs *website* pemerintahan dapat memudahkan masyarakat luas untuk mengetahui informasi mengenai pemerintahan seperti kinerja, program maupun kebijakan baru yang berkaitan dengan instansi pemerintahan (Nurjannah, 2019).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Dewi, 2021). Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan dalam penyusunan laporan

keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan, karena teknologi informasi memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih cepat, efektif dan efisien (Darwis, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pemerintah pusat dan daerah yang berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi dan pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Rahmawati, 2018).

### **2.1.5 Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). SPIP merupakan pedomanan pelaksanaan

pengendalian, dimana fungsi sistem pengendalian internal adalah pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya, manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi yang dilakukan secara komprehensif (Mildamayanti, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bahwa unsur sistem pengendalian internal meliputi (Wardani, 2017):

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personal organisasi mengenai pengendalian.

2) Penilaian Risiko

Tujuan pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan perusahaan yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya pihak perusahaan mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar perusahaan.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen.

Kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif.

4) Informasi dan Komunikasi

Kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah kebijakan dan prosedur atas transaksi yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Perusahaan harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yaitu informasi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan

Proses penilaian kualitas kinerja diukur dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu dan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

### 2.1.6 Tingkat Pengalaman Kerja

Keterampilan (*skill*) karyawan atau pegawai juga dapat diukur dengan lama masa kerja atau pengalaman kerjanya. Pengalaman akan menentukan dalam melaksanakan suatu tugas tertentu. Menurut Atika (2019) pengalaman

kerja adalah ukuran lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas sesuatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. Pengalaman kerja seorang pegawai dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Seorang pegawai yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih mengerti apa yang harus dilakukan jika menghadapi masalah pekerjaannya. Biasanya pegawai yang memiliki pengalaman kerja, akan lebih mudah menyatu dengan pekerjaannya dan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi karena pegawai tersebut telah menguasai pekerjaan tersebut sebelumnya (Budiono, 2018).

Pengalaman dan pendidikan sering digunakan secara bersamaan, karena kombinasi antara pengalaman dan pendidikan dapat menciptakan kemampuan tersendiri dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Orang yang berpengalaman telah mempraktekkan teori yang pernah diperoleh dari belajar dan pendidikan. Dengan demikian perpaduan antara pengalaman dan pendidikan akan lebih meningkatkan mutu pekerjaan atau tugas-tugas dalam aktivitasnya. Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi pihak internal untuk menjadikan pegawainya kaya akan kualitas penyajian laporan keuangan. Semakin tinggi pengalaman yang dimiliki seorang pihak internal, maka semakin mampu dan mahir pegawai itu menguasai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang dikerjakannya (Budiono, 2018).

#### **2.1.7 Pemahaman Akuntansi**

Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Laporan keuangan yang berkualitas berhubungan dengan kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam

menyusun laporan keuangan, sehingga harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku (Lestari, 2020).

Fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai dengan laporan keuangan yang telah tersistem dengan menggunakan komputersisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Oleh sebab itu, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu (Tawaqal, 2017).

Tingkat pemahaman akuntansi adalah bagaimana seseorang mampu mengerti dan memahami hal yang telah dipelajari yang berkaitan dengan mata kuliah akuntansi, serta bisa menalarakan pencatatan dan transaksi keuangan suatu kesatuan ekonomi. Tingkat pemahaman akuntansi dinyatakan dengan seberapa mengerti seseorang terhadap apa yang sudah dipelajari tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila mengerti bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan. Tingkat pemahaman yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas (Lestari, 2020).

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan serta perbandingan. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Rahmawati (2018) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi standar akuntansi pemerintah, utilisasi teknologi informasi, dan sistem kontrol internal secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel tingkat pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi.

Sako (2018) dalam penelitiannya menggunakan 1 (satu) variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sako (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini menambahkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, tingkat pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi.

Dewi (2021) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi, tingkat Pendidikan dan pengalaman kerja, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Mengwi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman kerja. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan pemahaman akuntansi.

Mildamayanti (2018) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi Informasi, serta 1 (satu) variabel independen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mildamayanti (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel tingkat pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi.

Mutiana (2017), dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu pengaruh sistem pengendalian internal, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada satker di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiana (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel sistem pengendalian internal dan teknologi informasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, tingkat pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi.

Atika (2019) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, pengalaman kerja serta peran internal audit, serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pengalaman kerja dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Atika (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pemahaman akuntansi dan pengalaman kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel peneapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi.

Lestari (2020) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal, serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pemahaman akuntansi dan sistem pengendalian internal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel

pemanfaatan teknologi informasi, tingkat pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi.

Sukriani (2018) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel yaitu tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi, serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriani (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pengalaman kerja dan penggunaan teknologi informasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan pemahaman akuntansi.

Darwis (2020) dalam penelitiannya menggunakan 2 (dua) variabel internal yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal, serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini

menambahkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, tingkat pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi.

Tawaqal (2017) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Banda Aceh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tawaqal (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel sistem pengendalian internal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini menambahkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, tingkat pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi.

Pujanira (2017) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah Provinsi DIY. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) adalah penelitian isi sama-sama menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini menambahkan variabel sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, tingkat pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi.

Mokoginta (2017) dalam penelitiannya menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah, serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta (2017) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel sistem pengendalian internal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, tingkat pengalaman kerja dan pemahaman akuntansi.

Budiono (2018) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja serta pemanfaatan teknologi informasi, serta 1 (satu) variabel dependen yang digunakan yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiono (2018) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel tingkat pengalaman kerja dan pemanfaatan teknologi informasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan pemahaman akuntansi.

